

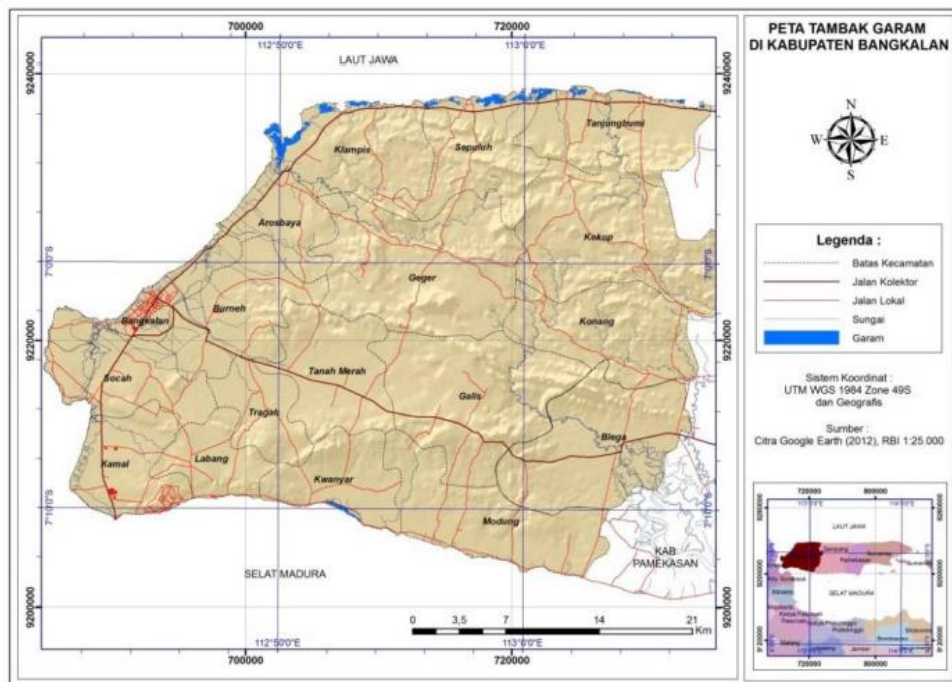
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

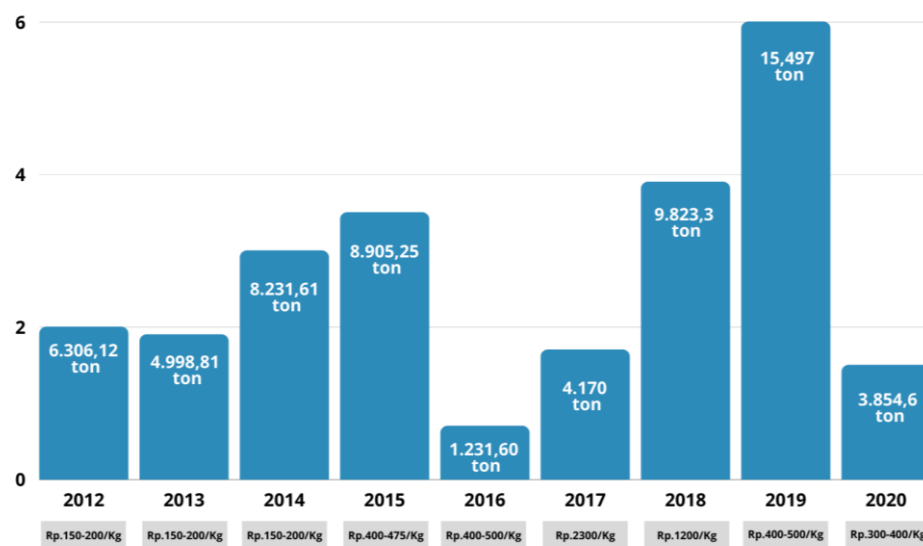
Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km yang mana kondisi wilayah Indonesia sepertiganya berupa laut, sehingga Indonesia termasuk daerah yang memiliki potensi untuk memproduksi garam. Garam merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam segi konsumsi, namun juga dalam perindustrian, sebagai pengawet dan campuran bahan kimia.

Berbicara mengenai garam, tidak bisa dipungkiri akan teringat dengan suatu daerah dengan nama Madura yang sejak lama telah dikenal sebagai “Pulau Garam”. Madura merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia. Sejak awal abad ke-20, Madura sudah menjadi pusat produksi garam berdasarkan sistem monopoli. Seluruh kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di Madura memproduksi garam.



Gambar 1.1 Peta Tambak Garam Kabupaten Bangkalan
Sumber gambar : E-Book Garam Rakyat Potensi dan Permasalahan

Produksi garam yang dilakukan petani di Madura sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, salah satunya yaitu Desa Gili Barat Kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan sehingga petani garam menghadapi beberapa permasalahan diantaranya yang paling mendasar adalah mengenai regulasi harga yang menjadikan Petani garam berada dalam posisi lemah terkait proses penetapan kualitas dan harga di setiap pedagang. Pada tahun 2019 garam petani di Bangkalan dibandrol hanya Rp300,00/Kg, meskipun musim kemarau sangat menjanjikan untuk memproduksi garam namun dengan nilai jual yang sangat rendah sekali membuat para petambak garam di Bangkalan semakin lama menyusut dan mulai beralih aktivitas.



Gambar 1.2 Grafik Harga dan Produksi garam di Bangkalan Tahun 2012-2021
Sumber: Kabar Madura 5 Juli 2021 telah diolah kembali

Pada tahun 2021 harga garam mulai mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit dan masih tergolong kecil, yaitu dibanderol Rp. 500 sampai 600 per kilogram nya. Harga tersebut masih belum ideal jika dibandingkan dengan biaya produksi garam yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan adanya wacana impor garam yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Bangkalan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang terkait kebijakan tersebut, sebab aktivitas tambak garam sudah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika wacana kebijakan Pemerintah Pusat terkait impor garam tersebut dilakukan maka tentu akan berimbas pada harga garam lokal. Pada intinya impor garam tidak begitu bermasalah jika memang fokus pada perindustrian, namun terkadang dari syarat garam industry bisa merembet ke garam aneka pangan, sementara waktu impor garam berjalan, stock garam rakyat digudang melimpah, sehingga harga garam lokal mengalami penurunan.

Permasalahan selanjutnya yaitu terkait aspek pemasaran, yang mana sistem tata niaga kurang jelas dan dianggap tidak menguntungkan para petani. Pada bulan Februari 2021, dilansir dari Jawapos Radar Madura bahwa garam rakyat sebanyak 2.449 Ton garam yang diproduksi tahun 2020 masih belum terserap. Pemerintah dianggap tutup mata terkait persoalan tersebut.

Pemerintah sebenarnya telah membuat beberapa regulasi kebijakan menyangkut tata niaga garam, akan tetapi kebijakan tata niaga garam lebih mengatur tentang garam impor sedangkan yang menyangkut garam rakyat tidak secara khusus dibahas dalam kebijakan pemerintah. Praktik kartel juga masih ada dalam tata niaga garam, dimana ada beberapa pihak yang menguasai dan menentukan harga, hal tersebut masih menjadi perhatian dari pemerintah sebab sangat susah sekali untuk mengubah sistem pemasaran dalam aktivitas pertanian garam. Akibatnya para petani enggan untuk menggarap tambaknya. Institusi yang ada pun tidak dapat berbuat lebih sebab penentuan harga garam adalah kewenangan pemerintah pusat. Meskipun penentuan harga garam adalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah pun harusnya wajib untuk mengupayakan agar harga garam kian mahal.

Hal tersebut mengingatkan pada keputusan yang pernah diambil oleh pemerintah untuk mengimpor garam tanpa memperdulikan pasokan garam yang melimpah di negeri sendiri. Keputusan tersebut diambil lantaran kebutuhan garam nasional setiap tahun cukup besar, namun total produksi pasokan garam dalam

negri hanya sebesar 1.400 juta ton, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah memiliki opsi untuk mengimpor garam.

Kelebihan permintaan garam tersebut harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani garam, namun untuk mewujudkannya petani garam di Bangkalan memiliki beberapa kendala sehingga keputusan pemerintah untuk mengimpor garam dianggap mencekik kehidupan petani garam, karena produksi garam lokal menjadi tersaingi dan mempengaruhi harga.

Hal lain yang membuat pemerintah mengimpor garam dari luar adalah dikarenakan mutu garam di Bangkalan yang relative rendah sebab sebagian besar petani masih belum mengerti bagaimana produksi garam yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Fakta dilapangan menunjukkan adanya kelemahan pada vital mutu garam yang sering dijumpai pada garam rakyat antara lain rendahnya kandungan iodine yang kadang tidak memenuhi standar. Rendahnya kualitas garam rakyat, produksi petambak garam menyebabkan produksi garam petambak akan sulit bersaing dengan garam impor salah satunya dari sudut pertimbangan harga.

No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan
1	Kadar air (H ₂ O)	% (b/b)	Maks 7
2	Jumlah klorida (Cl)	% (b/b) adbk	Min 94,7
3	Yodium dihitung sebagai kalium yodat (KIO ₃)	mg/kg	Min 30
4	Cemaran logam :		
	Timbal (Pb)	mg/kg	Maks 10
	Tembaga (Cu)	mg/kg	Maks 10
	Raksa (Hg)	mg/kg	Maks 0,1
	Arsen (As)	mg/kg	Maks 0,1

Sumber; Badan Standarisasi Nasional (SNI 01-3556-2000/Rev.9)

Gambar 1.3 Tabel Syarat Mutu Garam sesuai SNI
Sumber Gambar: E-Book Garam Rakyat Potensi dan Permasalahan

Permasalahan yang terakhir yakni terbatasnya infrastruktur dan fasilitas produksi. meskipun saat ini sudah ada beberapa cara baru, seperti geomembran dan

rumah prisma namun belum tentu efisien dari perhitungan keekonomian untuk memproduksi garam, karena ada tambahan biaya produksi yang mengharuskan para petani untuk melakukan peminjaman modal dengan syarat penulisan sekian bulan sesuai kesepakatan, dilansir dari web resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bahwa tahun 2021 pemerintah akan memberikan bantuan geomembran kepada petani garam.

Bantuan alat tersebut hanya untuk satu kelompok petani garam. Meski terbatas, bantuan teknologi geomembrane diharapkan mampu mendongkrak produksi garam. Produksi garam di Bangkalan tentu tidak bisa dipungkiri dari adanya sistem komunikasi Pemerintah, yang menginformasikan segala hal terkait produksi dan pendistribusian garam melalui sistem ini yang dijalankan oleh struktur komunikasi.

Sistem komunikasi pemerintah harusnya memberikan wadah informasi yang memadai untuk menyelesaikan persoalan petani garam di Bangkalan, namun kebijakan dan peran pemerintah dianggap kurang begitu terasa sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap petani garam.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian tidak akan terlepas dari adanya sebuah rumusan masalah yang akan diteliti. Maka dari itu analisis dilakukan untuk pemecahan dari masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana adaptasi sistem komunikasi pemerintah dalam menghadapi kompleksitas pertanian garam di Kabupaten Bangkalan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Adaptasi Sistem Komunikasi Pemerintah dalam Kompleksitas Pertanian Garam di Kabupaten Bangkalan” terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Adaptasi sistem komunikasi pemerintah dalam menghadapi kompleksitas pertanian garam di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang nantinya bermanfaat dalam pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi, khususnya bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem komunikasi pemerintah.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang sistem komunikasi pemerintah
- b. Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literature untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memproduksi dan mereproduksi informasi.
- d. Sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata dalam dunia komunikasi.
- e. Untuk memenuhi Tugas Akhir yang nantinya akan diajukan pada Skripsi.